

# KONSTRUKSI SOSIAL MEDIA TWITTER WALIKOTA BANDUNG

(Studi Analisis Framing Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Online  
2015 di Media Sosial Twitter Walikota Bandung)

Dieni Nurdianingsih, Dedeh Fardiah, Rini Rinawati

Magister Ilmu Komunikasi, Pascasarjana Universitas Islam Bandung  
Jl. Purnawarman No.59 Bandung 40116

dieninurdianingsih@gmail.com<sup>1</sup>  
dedehfardiah@gmail.com<sup>2</sup>  
nierinirinawati66@gmail.com<sup>3</sup>

## ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis media *online* dalam hal ini media sosial *twitter* milik Walikota Bandung Ridwan Kamil (@ridwankamil) dalam membongkar permasalahan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2015 di Bandung. Dengan menggunakan analisis *framing* model Robert N. Entman, yang merupakan salah satu varian dari metode penelitian kualitatif.

Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: bagaimana media sosial *twitter* Walikota Bandung Ridwan Kamil (@ridwankamil) mengidentifikasi masalah PPDB Online, bagaimana media sosial *twitter* Walikota Bandung Ridwan Kamil (@ridwankamil) memperkirakan sumber masalah PPDB Online 2015, bagaimana media sosial *twitter* Walikota Bandung Ridwan Kamil (@ridwankamil) membuat penilaian moral atas masalah PPDB Online 2015, dan bagaimana bentuk penyelesaian masalah yang ditawarkan oleh media sosial *twitter* Walikota Bandung Ridwan Kamil (@ridwankamil) atas masalah PPDB Online 2015.

Dari hasil penelitian, dalam mengidentifikasi masalah, media sosial *twitter* Walikota Bandung Ridwan Kamil (@ridwankamil) memandang masalah PPDB Online 2015 ini bukan terjadi karena kesalahan pada sistem PPDB karena sudah berjalan semestinya. Ini terjadi karena adanya manipulasi dalam Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Peristiwa PPDB Online ini dipahami sebagai “Pemalsuan”, “Manipulasi”, dan bahkan Ridwan Kamil sering menulis “SKTM Bodong”. Dalam memperkirakan sumber masalah, Ridwan Kamil menganggap adanya pemalsuan SKTM dalam pendaftaran PPDB Online 2015 menjadi sumber masalah. Oknum orang tua dan mafia SKTM palsu yang memanipulasi dengan berpura-pura miskin padahal berasal dari keluarga yang berkecukupan dianggap sebagai aktor penyebab masalah ini. Dalam membuat keputusan moral, Ridwan

---

<sup>1</sup> penulis

<sup>2</sup> Pembimbing utama

<sup>3</sup> Pembimbing pendamping

Kamil dalam *twitter*-nya menilai idealnya semua pendidikan gratis untuk semua warga. Namun, Pemkot Bandung sementara ini hanya sanggup gratiskan untuk warga golongan tidak mampu. Maka dari itu, masyarakat mapan yang mengaku miskin harus ditindak. Dalam hal bentuk penyelesaian masalah, Ridwan Kamil melibatkan kepolisian dalam masalah ini. Jika terbukti menggunakan SKTM palsu akan langsung diproses polisi karena kriminal pemalsuan data.

**Kata Kunci:** *Ridwan Kamil, PPDB Online, Twitter, Analisis Framing.*

### **ABSTRACT**

*This research analyzes how an online media social media, in this case "twitter" belongs to the Mayor of Bandung, Ridwan Kamil (@ridwankamil) framed in the issue of acceptance of new learners (PPDB) online 2015 in Bandung. By using framing analysis model of Robert N. Entman, which is one of the variants of the qualitative research methods.*

*Specifically this study aims to find out : how Ridwan Kamil's twitter social media (@ridwankamil) makes a moral judgement over the issue of PPDB online in 2015, and how the form of the resolution offered by Ridwan Kamil's twitter over the issue of PPDB online in 2015.*

*From the result of the research, the researcher found in identifying problems, Ridwan Kamil's twitter found that the problem of PPDB online 2015 it doesn't happen because of an error in the system, the PPDB system has been running properly. This problem happens because of the manipulation in the incapability of affidavits (SKTM). PPDB event is conceived as a "Forgery", "Manipulation", and even Ridwan Kamil often write "Fake SKTM". In estimating the source of the problem, Ridwan Kamil considers that counterfeiting SKTM PPDB Online Registration in 2015 is the source of the problem. Some of the irresponsible parents and Fake SKTM mafias manipulate data by pretending being poor but in fact they come from wealthy family is regarded as the main causes of the problem. In making moral decisions, Ridwan Kamil in his twitter tells that education for all citizens are free. However, for a while, the government is only able to free the community who are not able to finance their children education in Bandung. Thus, to solve the problem, Ridwan Kamil involved the police force in this issue. If the usage of fake SKTM proved, it should be directly processed by the police because it is a criminal of using fake data.*

**Keywords :** *Ridwan Kamil, PPDB Online, Twitter, Analytics Framing.*

## PENDAHULUAN

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bandung setiap tahunnya memang selalu diberlakukan dengan aturan yang berbeda, dan tentunya menuai kontroversi di kalangan masyarakat.

PPDB 2015 bisa dibilang paling menuai kontroversi. Setelah pada tahun sebelumnya diberlakukan kebijakan rayonisasi yang juga ditanggapi beragam oleh masyarakat. Carut marut PPDB 2015 bermula dari peraturan Walikota di ranah pendidikan khususnya jalur Afirmasi melalui SKTM pada awalnya dibuat untuk memudahkan masyarakat yang tidak mampu untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya di sekolah negeri. Namun hal ini memunculkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu.

Banyaknya sejumlah warga yang curang memanfaatkan surat keterangan tidak mampu (SKTM), saat mendaftarkan anaknya sekolah melalui PPDB online. Hal ini membuat beberapa netizen yang juga warga Bandung merasa kecewa atas kebijakan Walikota Bandung, Ridwan Kamil yang memberikan hak istimewa tanpa tes, tanpa nem, dan tanpa quota pada jalur keluarga miskin PPDB online 2015. Orang tua dan pelajar protes melalui *twitter* dan *instagram* Walikota Ridwan Kamil. Hingga melakukan aksi unjuk rasa ke DPRD Kota Bandung.

Begitu banyak kicauan (*tweet*) yang ditujukan kepada Ridwan Kamil mengenai permasalahan PPDB 2015 ini. Sehingga masalah PPDB ini menjadi perbincangan hangat di media sosial *twitter*. Memang tidak hanya di media sosial *twitters* saja, di media lain pun

khususnya media lokal Jawa Barat permasalahan ini menjadi *headline* utama.

Untuk melihat bagaimana kicauan (*tweet*) Ridwan Kamil dalam menanggapi permasalahan PPDB Online 2015 di media sosial *twitter*, peneliti tertarik untuk meneliti frame yang dimunculkan. Bagaimana frame yang dibentuk oleh media sosial *twitter* Ridwan Kamil dalam kasus PPDB Online ini. Frame bisa dikatakan sebagai cara bercerita yang menghadirkan konstruksi makna peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana (dalam Eriyanto, 2002: 255). Tidak hanya media massa televisi dan media cetak seperti koran dan majalah yang di dalamnya terdapat frame. Media massa baru yakni situs berita yang dapat diakses melalui internet dan juga media sosial mengandung frame di dalamnya. Berdasarkan fenomena di atas maka peneliti ingin mengkaji "Bagaimana Kebijakan PPDB Online 2015 dikonstruksi oleh Media Sosial *Twitter* Walikota Bandung Ridwan Kamil?".

## METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dapat memperlihatkan pengalaman individu menghadapi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dan mempelajari tentang kelompok dan pengalaman-pengalaman yang mungkin tidak diketahui sebelumnya.

Deddy Mulyana menggunakan definisi yang lebih sederhana. Menurutnya penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretative (menggunakan penafsiran) yang melibatkan metode, dalam menelaah masalah

penelitiannya (Mulyana dan Solatun, 2013:5).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian analisis framing. Analisis framing digunakan untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksikan fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perpektifnya (Sobur, 2001: 162).

Pada penelitian ini peneliti menggunakan model Robert N. Entman. Entman mendefinisikan *framing* sebagai seleksi dari berbagai aspek realitas yang diterima dan membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam suatu teks komunikasi.

Dalam proses *framing* terdapat berbagai kepentingan yang menempel dengannya, bisa berasal dari pemilik/pemegang saham terbesar media, pengiklan, atau dari institusi penekan lain seperti pemerintah, agama, dan lain-lain. Entman juga menyertakan penempatan informasi-informasi dalam konteks yang khas sehingga sisi tertentu mendapatkan alokasi lebih besar daripada sisi yang lain (Sobur, 2001: 67).

Adapun teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah Mengumpulkan kicauan (*tweet*) yang berkenaan dengan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online 2015 di Twitter Walikota Bandung Ridwan Kamil (@ridwankamil) yang berlangsung pada 29 Juni 2015 sampai 6 Juli 2015. Hal ini

dikarenakan *tweet* Ridwan Kamil maupun *tweet* balasan Ridwan Kamil mengenai PPDB 2015 hanya ada dalam rentang waktu tersebut. Jumlah kicauan (*tweet*) di media sosial twitter Ridwan Kamil @ridwankamil secara keseluruhan berjumlah 42 *Tweet*.

Teknik analisis data digunakan model analisis framing Robert N. Entman. Seperti yang telah dijelaskan dalam kajian literatur, model analisis Robert N. Entman terdiri dari dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan penekanan atau penonjolan aspek- aspek tertentu dari realitas atau isu. Kemudian untuk mendefinisikan realitas yang akan diteliti, Entman mengajukan empat tahap yaitu: *define problems, diagnose causes, make moral judgment, treatment recommendation* (Eriyanto, 2002:188).

*Define problems* (pendefinisian masalah) merupakan bingkai utama yang menekankan bagaimana sebuah peristiwa dipahami oleh penulis. *Diagnose causes* (memperkirakan penyebab masalah), merupakan elemen *framing* untuk membingkai siapa yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa. *Make moral judgment* (membuat pilihan moral) adalah elemen *framing* yang dipakai untuk membenarkan/memberi argumentasi pada pendefinisian masalah yang sudah dibuat. *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian) merupakan elemen yang dipakai untuk merekomendasikan jalan penyelesaian apa yang dipilih untuk menyelesaikan masalah. (Eriyanto, 2002:189-191).

Keempat tahapan ini akan digunakan sebagai instrumen untuk

menganalisis masalah kebijakan PPDB Online 2015 di media sosial Twitter Walikota Bandung Ridwan Kamil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Konstruksi Kebijakan PPDB Online 2015 oleh Media Sosial Twitter Walikota Bandung Ridwan Kamil dilihat dari Aspek Define Problems

Kicauan (Tweet)	Frame	
<i>SKTM itu utk lindungi warga miskin yg rentan putus sekolah. Yg jd masalah ada manipulasi RT @CEPRULLI: ceroboh sktm bisa msk sekolah negeri.</i>	Manipulasi	Pemalsuan SKTM
<i>Rapat penyelidikan pemalsuan SKTM bersama kepolisian.....</i>	Pemalsuan SKTM	
<i>SKTM bodong/preman2nya sdg diperiksa polisi. Sila lapor tim pengaduan RT @nugraba197 2: masa anak saya nem 33,2 tergeser ol pura2 miskin.</i>	SKTM bodong	

<i>Sebelum ppdb dimulai semua ortu sdh dikumpulkan sekolah utk sosialisasi. Mungkin ibu tsk hadir RT @heni0102: aturan ppdb kurang sosialisasi.</i>	Kurangnya sosialisasi PPDB	Sosialisasi PPDB
---	----------------------------	------------------

Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016

Dari kicauan (*tweet*) Ridwan Kamil mengenai masalah PPDB 2015 terdapat beberapa frame yang ditampilkan dilihat dari aspek *define problems* seperti manipulasi, pemalsuan SKTM, SKTM bodong, dan kurangnya sosialisasi PPDB. Ridwan Kamil mbingkai pokok masalah dari PPDB Online 2015 ini adalah adanya manipulasi data. Peristiwa PPDB Online 2015 ini terjadi bukan karena sistem PPDB yang salah. Sebelumnya sebelum dimulai PPDB, para orang tua telah diberikan sosialisasi oleh sekolah masing-masing mengenai tata cara pelaksanaan PPDB Online.

Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberikan kontribusi dan feedback secara terbuka, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tidak terbatas. Media sosial kini telah berkembang pesat. Dengan kecepatan dalam penyebaran informasi dan komunikasi yang bersifat timbal balik, media sosial dalam beberapa hal telah mampu menggeser fungsi dari media konvensional (Tabroni, 2014:16).

Ridwan Kamil melakukan hal yang sama dengan mengajak siapa saja untuk berpartisipasi memberikan komentar mengenai permasalahan PPDB Online 2015. Para pengikut (*followers*) Ridwan Kamil di media sosial Twitter pun berbondong-bondong membanjiri akun @ridwankamil menanyakan kejelasan PPDB maupun memberikan laporan kecurangan SKTM. Seperti yang terlihat dalam beberapa kicauan (*tweet*) diatas, dimana Ridwan Kamil memberikan *feedback* secara terbuka dengan menjawab semua pertanyaan yang masuk ke akun media sosial Twitternya. Meskipun tidak semua *mention* dibalas oleh Ridwan Kamil.

Pendefinisian masalah (*define problems*) melihat bagaimana peristiwa itu dilihat atau dipahami. Dalam masalah PPDB Online 2015 ini dipahami sebagai sebagai “Pemalsuan SKTM”, “Manipulasi”, “SKTM Palsu” dan bahkan Ridwan Kamil sering menulis “SKTM Bodong” seperti yang terlihat dalam beberapa kicauan (*tweet*) diatas. Khalayak cenderung merupakan individu yang sering berbagi pengalaman dan pada lain sisi terpengaruh oleh individu lain dalam hubungan sosial. Hal ini juga dipahami oleh para *followers* (pengikut) Ridwan Kamil di *Twitter* dengan menggunakan istilah-istilah tersebut seperti SKTM bodong atau SKTM palsu.

## 2. Konstruksi Kebijakan PPDB Online 2015 oleh Media Sosial Twitter Walikota Bandung Ridwan Kamil dilihat dari Aspek Diagnose Causes

Kicauan ( <i>Tweet</i> )	Frame	
<i>Ada lebih dr 1000an kursi kosong krn SKTM palsu mudur, masa dibiarkan RT @ucie_wibowo: @mazNOT knp jadi diperpanjang ....</i>	SKTM palsu mengundurkan diri.	SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu ) Palsu/Bodong.
<i>Brigadir Polisi RW akan cek satu2 rumah yg mapan ngaku miskin &amp; pake SKTM.....</i>	Pengecekan SKTM palsu	
<i>SKTM bodong/preman2nya sdg diperiksa polisi. Sila lapor ke tim pengaduan RT @nugraha1972: masa anak sya nem tergeser ol pura2 miskin...</i>	Pemeriksaan SKTM bodong dan preman - preman nya oleh Polisi.	
<i>Mereka yang koar2 di koran, menolak polisi menindak SKTM palsu krn mereka sebenarnya bagian dr mafia SKTM palsu ini.</i>	Orang yang menolak penindakan SKTM adalah mafia SKTM.	Mafia SKTM
<i>Bukan sistem PPDB nya yang</i>	Permasalahan mental	Mental Orang Tua

<p><i>bermasalah, karena sudah seadil mungkin dalam keterbatasan bangku sekolah negeri. Yang jadi masalah MENTAL para oknum orang tua yang mengajari anak-anaknya berbohong adalah biasa.....</i></p>	<p>orang tua bukan sistem PPDB yang bermasalah.</p>	
---	---	--

**Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016**

Dari kicauan (*tweet*) Ridwan Kamil mengenai masalah PPDB 2015 terdapat beberapa *frame* yang ditampilkan dilihat dari aspek *diagnose causes* seperti SKTM palsu mengundurkan diri, pengecekan SKTM palsu oleh polisi ke rumah warga mapan, pengecekan SKTM bodong oleh Pemkot dan Polisi, pemeriksaan SKTM bodong dan preman-premanya oleh Polisi, orang yang menolak penindakan SKTM adalah mafia SKTM dan permasalahan mental orang tua bukan sistem PPDB yang bermasalah. Dari beberapa *frame* yang muncul dikerucutkan menjadi tiga *frame* yang menjadi penyebab masalah yaitu SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) palsu/bodong, adanya mafia SKTM, dan mental Orang Tua.

Sama seperti media sosial lainnya, di *Twitter* pengguna bisa menjalin jaringan dengan pengguna lain, menyebarkan informasi,

mempromosikan pendapat/pandangan pengguna lain, sampai membahas isu terhangat (*trending topic*) saat itu juga dan menjadi bagian dari isu tersebut dengan turut berkicau (*tweet*) menggunakan tagas (*hashtag*) tertentu (Nasrullah, 2015: 43).

Masalah PPDB Online 2015 ini menjadi isu terhangat di media sosial *Twitter*. Para pengguna media sosial *Twitter* khususnya yang mengikuti akun @ridwankamil menyebarkan informasi-informasi mengenai kericuhan sistem PPDB Online. Terlebih lagi para pengguna yang terimbas oleh adanya SKTM palsu sebagai penyebab masalah turut berkicau di akun @ridwankamil untuk mendapatkan kejelasan.

Penyebab masalah tidak harus terpaku oleh apa, namun juga siapa aktor, yang dalam wacana tersebut dituding sebagai penyebab masalah. Dengan kata lain, pendefinisian sumber masalah ini menyertakan secara lebih luas siapa yang dianggap sebagai pelaku dan siapa yang dipandang sebagai korban (Eriyanto, 2002: 225).

Ridwan Kamil membingkai pelaku atau aktor dibalik kericuhan PPDB Online 2015 adalah mafia SKTM palsu. Bahkan Ridwan Kamil juga terlihat menyudutkan pihak orang tua sebagai pihak yang bersalah. Mengajarkan anak-anak mereka untuk berbohong. Berpura-pura sebagai anak miskin untuk mendapatkan SKTM agar mendapatkan keringan biaya padahal mereka berasal dari keluarga yang mampu. Disini juga diperlihatkan bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat miskin yang rentan putus sekolah. SKTM adalah cara agar

mereka bisa bersekolah. Namun cara tersebut malah digunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan masyarakat miskin semakin sulit untuk bersekolah tergeser oleh anak yang “mengaku miskin”.

Peter L. Berger dan Thomas Luckman, proses konstruksi sosial media massa berlangsung pada suatu proses yang simultan, yakni eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Dalam pandangan konstruksionis, media dipandang sebagai subjek yang mengkonstruksi realitas. Lewat berbagai instrumen yang dimilikinya, media ikut membentuk realitas yang tersaji dalam bentuk pemberitaan (Eriyanto, 2002: 22-23).

Lebih lanjut dalam proses konstruksi realitas dimulai, Peter L. Berger dan Thomas Luckmann mengat akan bahwas sebagai unsur utama.

Berger dan Luckman mengatakan proses konstruksirealitas dimulaiketika seorang konstruktor melakukan objektivikasi terhadap suatu kenyataan yakni melakukan persepsi terhadap suatu objek. Dalam hal ini, seperti yang telah disebutkan diatas bahwa Ridwan Kamil menganggap atau mempersepsikan bahwa pemicu kericuhan sistem PPDB Online 2015 adalah penyalahgunaan SKTM palsu yang dilakukan oleh orang tua dan mafia SKTM palsu. Selanjutnya, hasil dan pemaknaan melalui proses persepsi itu diinternalisasikan kedalam diri seorang konstruktor. Langkah terakhir adalah melakukan eksternalisasi atas hasil dari proses

secara internal tadi melalui pernyataan-pernyataan. Alat membuat pernyataan tersebut adalah kata-kata atau bahasa. Tahap akhir ini ialah Ridwan Kamil menyampaikan persepsi tersebut melalui media sosial *Twitter* yang berupa kicauan (*tweet*).

### 3. Konstruksi kebijakan PPDB Online 2015 oleh Media Sosial *Twitter* Walikota Bandung Ridwan Kamil dilihat dari Aspek *Make Moral Judgement*

Kicauan ( <i>Tweet</i> )	Frame	
<i>Idealnya semua pendidikan gratis untuk semua warga. Namun Pemkot BDG sementara ini hanya sanggup gratiskan untuk warga golongan tidak mampu.</i>	Pendidikan gratis untuk golongan tidak mampu.	Status Ekonomi
<i>Sudah 1000 warga mapan ngaku miskin pake SKTM ut masuk negeri mengundurkan diri....</i>	Warga mapan mengundurkan diri.	
<i>NEM bagus pasti msk, miskin &amp; tidak pintar itu yg paling rentan.</i>	Warga miskin dan tidak pintar harus dibela.	

<p><i>Harus dibela RT @nonbarirlfc : akademis yg Nem bagus kalah sama SKTM nilai jeblok...</i></p>		
<p><i>Di Bandung tidak boleh ada anak yg putus/tidak sekolah. Itulah kenapa segmen plg rentan: miskin &amp; tidak pintar dibela masuk negeri gratis.</i></p>	<p>miskin &amp; tidak pintar dibela masuk negeri gratis.</p>	

**Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016**

Dari kicauan (*tweet*) Ridwan Kamil mengenai masalah PPDB 2015 terdapat beberapa *frame* yang ditampilkan dilihat dari aspek *Make MoralJudgement*, seperti pendidikan gratis diperuntukkan kepada warga tidak mampu, warga mapan yang “mengaku” miskin dengan menggunakan SKTM palsu mengundurkan diri, warga miskin dan tidak pintar harus dibela, dan segmen paling rentan miskin dan tidak pintar dibela masuk negeri gratis. Dari keempat *frame* yang muncul dapat ditarik satu garis besar bahwa *frame* secara keseluruhan dilihat dari aspek *make moral judgment* ialah mengenai status ekonomi. Kenapa status ekonomi, dikarenakan kicauan Ridwan Kamil di media sosial *Twitter* dilihat dari aspek *make moral judgment* berisikan tentang masyarakat kurang

mampu, dan masyarakat mapan yang merupakan status ekonomi dilihat dari kaya dan miskin. Kicauan Ridwan Kamil diatas menegaskan bahwa anak-anak di Bandung tidak boleh ada yang putus sekolah maka dari itu masyarakat miskin dan tidak pintar harus dibela untuk masuk sekolah negeri.

Nilai moral yang ditekankan oleh Ridwan Kamil melalui kicauannya adalah penegasan bahwa SKTM diperuntukkan untuk masyarakat yang miskin. SKTM dibuat untuk melindungi masyarakat miskin agar tetap bersekolah. SKTM seharusnya digunakan oleh masyarakat yang miskin bukan masyarakat yang “ngaku-ngaku” miskin.

Dalam media sosial juga memiliki aturan (hukum) dan etika yang berlaku. Etika di internet atau *netiquette* berasal dari kata “*net*”, untuk menjelaskan jaringan (*network*) atau bisa juga internet, dan “*etiquette*” yang berarti etika atau tata nilai yang diterapkan dalam komunikasi di dunia siber.

*Netiquette* merupakan sebuah konvensi atas norma-norma yang secara filosofi digunakan sebagai panduan bagi aturan atau standar dalam proses komunikasi di internet atau merupakan etika berinternet sekaligus perilaku sosial yang berlaku di media online (Thurlow et al., 2004: 65 dalam Nasrullah, 2015: 182).

Meski aturan atau etika berinternet telah ada, sifat media internet yang terbuka tetap saja memiliki peluang terhadap pelanggaran dan perbuatan-perbuatan kontraproduktif. Ridwan Kamil pasti memahami etika dalam media sosial.

Beliau sebagai pejabat bahkan panutan masyarakat Kota Bandung pasti memikirkan setiap kicauan (*tweet*) yang akan di-*posting* di akun media sosial *Twitter*nya. Tidak akan asal dalam menulis suatu kicauan, karena jika beliau melenceng dari norma atau aturan yang ada seperti yang telah disampaikan diatas sama saja dengan mencoreng nama baiknya sebagai Walikota Bandung.

Dilihat dari etika penulisan di media sosial yang tertulis dalam UU ITE. Kicauan (*tweet*) yang ditulis oleh Ridwan Kamil tidak melanggar etika yang ada di media sosial, seperti tidak memuat sesuatu yang melanggar kesusilaan, berisikan perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, kebohongan, pelanggaran terhadap suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA), dan juga pelanggaran terhadap privasi.

**4. Konstruksi kebijakan PPDB Online 2015 oleh Media Sosial Twitter Walikota Bandung Ridwan Kamil dilihat dari Aspek Treatment Recommendation**

Kicauan (Tweet)	Frame	
Laporkan via dm ya. Dgn polisi kita cek RT @malicman: ada yg dftar pke sktm, tpi pnya hp,. Bahkan ada yg ortunya pns,....	Pengecekan oleh polisi.	Polisi turuntangan memproses SKTM palsu.
Yg begini akan diproses kepolisian	Kepolisian mempr	

<i>minggu ini. Siap2 aja bagi yg bohong RT @dhilah_Noey : pake jalur SKTM pas di verifikasi trnyt orang mampu...</i>	proses SKTM palsu.	
<i>Semua kasus pst ada jawabannya. Silkn kontak tim pengaduan ppdb RT @nugraba197 2: hilang dari system. Knp begitu. Pendaftaran ditutup sabtu.</i>	Tim pengaduan PPDB untuk menang gapi keluhan masyarakat.	Dibuat akun/kontak khusus menjawab pertanyaan atau keluhan PPDB.
<i>Selanjutnya semua pertanyaan bisa kontak @ppdbkotabandung. Tidak semua bisa saya pribadi jawab.....</i>	Pertanyaan langsung PPDB kontak @ppdbkotabandung	
<i>RT/RW/Lurah akan diberi sanksi RT @innaleozy: SKTM kan hrs pengantar dr rt rw, hrs'a tau dong? Lurah jg kudu tanggung jwb dong"</i>	Lurah yang terbukti melanggar SKTM palsu harus bertanggungjawab.	Adanya sanksi

**Sumber: Hasil Olahan Peneliti, 2016**

Dari kicauan (*tweet*) Ridwan Kamil mengenai masalah PPDB

2015 terdapat beberapa *frame* yang ditampilkan dilihat dari aspek *treatment recommendation* seperti polisi turun tangan untuk memproses SKTM palsu, dibuat akun/kontak khusus menjawab pertanyaan atau keluhan PPDB dan adanya sanksi. Keseluruhan kicauan (*tweet*) Ridwan Kamil berisi solusi. Ridwan Kamil meminta warga mapan yang mengaku “miskin” untuk mengundurkan diri atau polisi akan menindak secara hukum karena hal ini telah termasuk kepada tindakan kriminal pemalsuan data. Selain itu, dijatuhkannya sanksi kepada orang yang terlibat dalam pemalsuan SKTM ini. Dikarenakan Ridwan Kamil tidak bisa menjawab semua pertanyaan yang masuk lewat akun media sosial *Twitter*nya, maka Ridwan Kamil membuat akun media sosial *Twitter* khusus PPDB Online dengan nama akun @ppdbkotabandung.

Media sosial pada dasarnya hanya menyambungkan masyarakat maya yang satu dengan yang lainnya melalui kesepahaman dan persamaan kepentingan. Media sosial tidak menjadi *war area* yang dapat menghantam siapa saja yang dianggapnya musuh. Di dalam media sosial, setiap orang adalah teman, ia menyambungkan satu orang dengan yang lainnya sehingga dapat melakukan kolaborasi sosial untuk sebuah kepentingan tertentu. Karenanya tidak ada permusuhan yang berarti di kepentingan tertentu (Tabroni, 2014: 162).

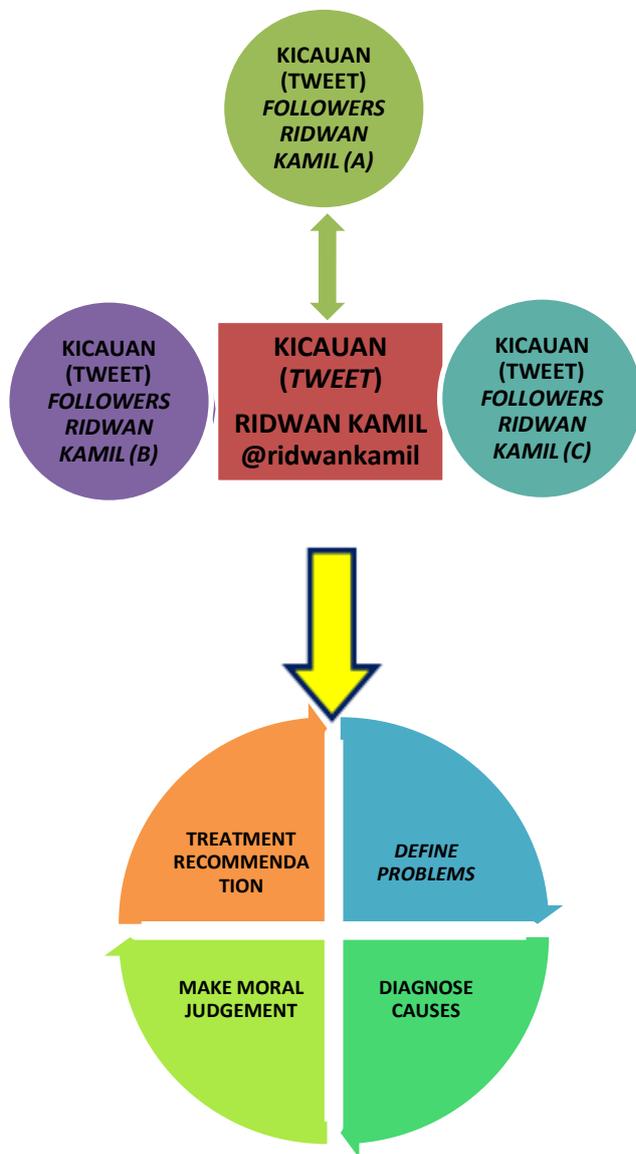
Masyarakat maya yang memiliki kesepahaman dan persamaan kepentingan dalam hal ini masyarakat yang memiliki kesamaan masalah mengenai PPDB Online

2015 terhubung satu sama lain. Mereka yang memiliki persamaan kepentingan akan terus mengikuti setiap perkembangan yang ada dan berbagi informasi mengenai kelanjutan PPDB Online.

Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik (*feedback*) dari setiap orang yang tertarik. Tidak ada yang bisa membatasi seseorang untuk menjadi bagian dari media sosial. Setiap orang dapat melakukannya secara bersama-sama berdasarkan kesadaran sendiri (Antony Mayfield, dalam Tabroni, 2014: 162).

Akun Ridwan Kamil @ridwankamil dibanjiri oleh *mention-mention* dari para *followers* yang menanyakan nasib anak-anaknya yang terkena imbas masalah SKTM palsu. Maka tidak heran jika semua isi kicauan (*tweet*) Ridwan Kamil berisi solusi atau pemecahan masalah mengenai masalah ini. Karena yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah tindakan secepat mungkin yang dilakukan oleh Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung.

Permasalahan PPDB Online 2015 di media sosial *Twitter* Ridwan Kamil dalam penelitian ini digambarkan secara global pada model berikut ini,



**Gambar 1. Model Kicauan (Tweet) Mengenai PPDB Online 2015 di Media Sosial Twitter Ridwan Kamil**  
**Sumber : Hasil Penelitian 2016**

Seperti yang terlihat diatas bahwa pola atau model yang terjadi antara Ridwan Kamil dan *followers*-nya di media sosial *Twitter* terlihat adanya *feedback*. Saat Ridwan Kamil membuat status, saat itu pula langsung dikomentari oleh para *followers*-nya. Begitu pula para *followers*-nya saat memberikan pertanyaan kepada Ridwan Kamil, Ridwan Kamil langsung menjawab pertanyaan tersebut. Misalnya *followers* A memberikan pertanyaan mengenai PPDB kepada Ridwan Kamil, Ridwan Kamil memberikan jawaban kepada *followers* A. *Followers* B memberikan pertanyaan, di jawab oleh Ridwan Kamil begitu *followers* yang lainnya. Seperti itulah interaksi yang terjadi antara Ridwan Kamil dan *followers*-nya saat membicarakan masalah PPDB Online 2015. Dengan menggunakan analisis *framing* Robert N. Entman, *frame* kicauan (*tweet*) mengenai PPDB Online 2015 di media sosial *Twitter* Ridwan Kamil @ridwankamil dikategorikan ke dalam 4 elemen yaitu *define problems* (pendefinisian masalah), *diagnose causes* (memperkirakan masalah atau sumber masalah), *make moral judgement* (membuat keputusan moral), dan *treatment recommendation* (menekankan penyelesaian).

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat

dikemukakan beberapa simpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah (*define problems*), Ridwan Kamil menganggap peristiwa PPDB Online ini dipahami sebagai “Pemalsuan”, “Manipulasi”, dan bahkan Ridwan Kamil sering menulis “SKTM Bodong”. Permasalahan bukan pada sistem PPDB, tetapi adanya pemalsuan data yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
2. Sumber masalah (*diagnose causes*), Ridwan Kamil menganggap adanya pemalsuan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam pendaftaran PPDB Online 2015 menjadi sumber masalah. Oknum orang tua dan mafia SKTM palsu yang memanipulasi dengan berpura-pura miskin padahal berasal dari keluarga yang berkecukupan dianggap sebagai aktor penyebab masalah dan pihak yang dirugikan dalam masalah ini jelas masyarakat yang kurang mampu.
3. Penilaian moral (*make moral judgement*), Ridwan Kamil menilai idealnya semua pendidikan gratis untuk semua warga. Namun, Pemkot Bandung sementara ini hanya sanggup gratiskan untuk warga golongan tidak mampu. Maka dari itu, masyarakat mapan yang mengaku miskin harus ditindak. Dari etika penulisan di media sosial yang tertulis dalam UU ITE. Kicauan (*tweet*) yang ditulis oleh

Ridwan Kamil tidak melanggar etika yang ada di media sosial, seperti tidak memuat sesuatu yang melanggar kesusilaan, berisikan perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan, kebohongan, pelanggaran terhadap suku, ras, agama, dan antar golongan (SARA), dan juga pelanggaran terhadap privasi.

4. Penyelesaian masalah (*treatment recommendation*), Ridwan Kamil menawarkan solusi dengan meminta warga mapan yang mengaku miskin dengan menggunakan SKTM untuk masuk sekolah negeri diminta mengundurkan diri sampai batas waktu yang ditentukan. Jika tidak dan terbukti “bodong” akan diproses polisi karena kriminal pemalsuan data. Semua pihak yang terlibat dalam SKTM palsu akan diberikan sanksi.

## SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini maka peneliti memberikan rekomendasi:

- Perlu adanya pengembangan penelitian lain, khususnya mengenai media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa media sosial ini semakin berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi. Banyak hal yang bisa digali dari komunikasi di media sosial. Seperti penggunaan media sosial dalam komunikasi politik.
- Para pejabat harus mulai aktif dalam menggunakan media sosial. Dengan semakin

berkembangnya teknologi membuat masyarakat lebih mudah memanfaatkan media sosial. Masyarakat lebih sering berkeluh kesah di media sosial daripada turun langsung. Para pejabat harus pintar dalam

menggunakan media sosial namun tidak lupa dengan tugas utamanya.

## UCAPAN TERIMA KASIH

1. Dr. Dedeh Fardiah, M.Si, selaku dosen pembimbing utama yang senantiasa memberikan bimbingan. Memberikan motivasi dan pengarahan dengan penuh ketelitian dan kesabaran kepada peneliti selama penyusunan penelitian ini.
2. Dr. Hj. Rini Rinawati, M.Si, selaku dosen pendamping yang telah banyak memberikan motivasi, masukan-masukan, dan membantu peneliti agar penelitian ini bisa jauh lebih baik.
3. Prof. Dr. Neni Yulianita, M.S., selaku Ketua Program Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Islam Bandung yang selalu mengingatkan dan memberikan motivasi untuk menyelesaikan tesis.
4. Dan untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Eriyanto. 2002. *Analisis Framing, Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: PT LKiS Printing Cemerlang.
- Mulyana, Deddy dan Solatun. 2013. *Metode Penelitian Ilmu komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siosoteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Sobur, Alex. 2001. *Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Tabroni, Roni. 2014. *Komunikasi Politik Pada Era Multimedia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

## Internet

- Kompas. 2015. "Penerimaan Peserta Didik Baru Kacau Wali Kota Ridwan Kamil Didemo." <http://regional.kompas.com/read/2015/07/06/16360391/Penerimaan.Peserta.Didik.Baru.Kacau.Wali.Kota.Ridwan.Kamil.Didemo>. (Diverifikasi pada 02 April 2016, Pkl. 12:35 WIB).

Pojok Satu. 2015. <http://pojoksatu.id/news/2015/07/01/kisruh-ppdb-online-warga-bandung-hujat-ridwan-kamil/> (Diverifikasi pada 02 April 2016, Pkl. 08:52 WIB).